

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Media massa adalah salah satu elemen yang tak dapat diabaikan dalam upaya manusia untuk mencari berita terbaru. Berita adalah data terbaru yang bisa muncul dari berbagai sumber, kapan pun itu terjadi (Ibrahim, 2007). Kini, informasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia oleh karena itu, Peran penting media massa adalah menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat secara menyeluruh. Dalam upayanya untuk menyampaikan berita kepada publik, media massa menyebarkan informasi baik melalui saluran cetak maupun melalui platform elektronik (Zulfitra, n.d.).

Media selalu memiliki tujuan tertentu ketika menyajikan informasi, termasuk tujuan politis, ideologis, atau bahkan komersial. Dalam mencapai tujuan tersebut, media seringkali menggunakan manipulasi berita untuk memengaruhi opini pembaca agar sejalan dengan naratif yang diinginkan atau menggunakan teknik framing. Menurut Robert N. dan Entman, teori framing melibatkan penekanan pada aspek-aspek khusus dalam sebuah berita dengan maksud membentuk pandangan yang spesifik terhadap cerita tersebut. Dengan demikian, saat memberikan informasi kepada publik, lembaga media dapat fokus pada berita tertentu atau menggambarkan situasi dengan cara yang mungkin membuat orang

merasa tidak nyaman terhadap topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, framing digunakan untuk mengatur informasi agar sesuai dengan standar media.

Pada waktu itu, media massa memainkan peran kunci sebagai platform di mana masyarakat dapat berdiskusi mengenai isu-isu yang melibatkan tiga kelompok yang berbeda: publik, sumber berita, dan jurnalis. Dengan mempertimbangkan norma sosial yang unik di setiap organisasi dan hubungan yang terbentuk melalui cara mereka mengolah teks, ketiga kelompok ini terlibat dalam proses. Dalam konteks pendekatan framing, berita dianggap sebagai bentuk percakapan metaforis antara pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang memberikan jawaban. Setiap organisasi berusaha mendekati suatu isu dengan sudut pandang yang dapat menarik perhatian publik. Media massa dianggap sebagai perwakilan dari beragam perspektif yang ada di latar belakang organisasi, beserta berbagai motif yang mendasarinya. Semua pihak yang berwenang bersedia menyampaikan pendapat, klaim, atau argumen mereka mengenai isu yang sedang dibahas, dengan menggunakan bahasa simbolik atau retorika yang relevan dengan topik yang dibicarakan. (Eriyanto, 2022).

Dalam analisis framing, hal pertama yang peristiwa dianalisis dan dilaporkan. Dalam analisis framing, langkah awalnya adalah mengamati bagaimana media membangun konstruksi realitas. Wartawan dan media berperan aktif dalam merepresentasikan realitas. Secara lebih khusus, fokus pada cara media menggambarkan peristiwa dalam konteks konstruksi saat ini lebih signifikan daripada apakah gambaran tersebut bersifat negatif atau positif. Ini merupakan tambahan pada pemahaman tentang bagaimana bingkai media terbentuk oleh

praktik-praktik editorial dan redaksional yang diterapkan oleh media. (Leliana et al. 2021:60–67).

Menurut Agus dan Sigit (2004), konsep framing media saat ini telah menjadi topik menarik dalam berbagai penelitian media dalam beberapa tahun terakhir. Teori framing terus berkembang seiring dengan temuan penelitian yang relevan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komunikasi, sosiologi, dan ilmu politik. Konsep framing selalu merujuk pada cara setiap peristiwa dan isu dapat diinterpretasikan dan disusun, terutama oleh media dan para pengelola media, saat mereka menyajikannya kepada khalayak atau pemirsa mereka.

Dalam memberikan makna terhadap isu suatu kasus, media seringkali memiliki interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, perspektif yang digunakan dalam penulisan berita melibatkan berbagai aspek seperti sudut pandang, pemaknaan kasus, gaya penulisan, kategorisasi, dan unsur-unsur khusus yang mencerminkan isu-isu yang ingin ditekankan. Dalam proses menyampaikan berita kepada khalayak, terdapat kebijakan yang ditetapkan oleh keredaksian yang bisa membatasi kebebasan wartawan dalam menyusun berita. Kebijakan redaksional tersebut menjadi panduan dalam menentukan jenis kejadian apa yang dianggap pantas diangkat dan dipilih sebagai berita atau bahan komentar oleh surat kabar. Visi pokok yang dijabarkan dalam kebijakan redaksional tersebut menjadi kerangka dan acuan kriteria dalam menyaring serta mengolah informasi menjadi berita. (Zawawi, 2023).

Media memiliki peran penting dalam demokrasi, dan keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemberitaan media. Salah satu hambatan untuk mencapai pemberitaan berkualitas adalah terpusatnya kepemilikan media, seperti yang terjadi di Indonesia. Konsentrasi kepemilikan media pada sekelompok elit dapat mengancam keberagaman informasi yang disajikan kepada publik. Masalah semakin rumit ketika para elit tersebut juga merupakan pemimpin atau tokoh penting dalam partai politik, sering kali memanfaatkan media sebagai alat propaganda untuk kepentingan partai dan/atau pemilik media. Dampaknya, media cenderung melayani kepentingan partai politik dan pemiliknya daripada memprioritaskan kepentingan publik yang seharusnya menjadi dasar legitimasinya. Hal ini dapat merugikan proses demokrasi dengan merosotnya independensi media dan penurunan keberagaman informasi yang menciptakan pemahaman yang sehat dan beragam di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ini menunjukkan perlunya upaya untuk mengatasi konsentrasi kepemilikan media demi memastikan media berperan secara efektif dalam mendukung demokrasi yang sehat dan inklusif.

Indonesia mempesona dengan keragaman budaya, kelompok etnis, agama, dan ras yang dimilikinya. Sebagai negara yang terdiri dari beragam kelompok, Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi satu sama lain. Perbedaan dalam budaya, agama, dan bahasa dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dan interaksi. Oleh karena itu, penting bagi warga Indonesia untuk memahami perbedaan tersebut dan menganggapnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan bangsa.

Namun, kita juga harus menyadari adanya potensi konflik dan ketegangan terkait dengan SARA di Indonesia. Beberapa individu mungkin merasa tidak aman atau terancam oleh kehadiran orang yang berbeda dari kelompok mereka. Hal ini bisa memicu ketegangan antar kelompok yang pada akhirnya bisa berujung pada konflik. Maka dari itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling menghargai di antara individu dan kelompok di Indonesia.

Salah satu cara untuk menguatkan nilai-nilai toleransi adalah dengan membangun identitas keindonesiaan yang inklusif. Identitas keindonesiaan yang inklusif menunjukkan bahwa setiap warga Indonesia, dari berbagai latar belakang, memiliki hak untuk merasa menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia. Identitas ini juga menegaskan bahwa perbedaan dalam budaya, agama, dan bahasa adalah sebuah aset bagi bangsa Indonesia. Hal ini dapat menjadi dasar untuk membentuk kesadaran kolektif di Indonesia bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan kelemahan.

Tentu saja, usaha untuk membangun identitas keindonesiaan yang inklusif tidaklah mudah. Perbedaan-perbedaan dalam budaya, agama, dan bahasa merupakan tantangan yang harus diatasi dalam upaya ini. Meskipun begitu, dengan kesadaran kolektif dan kerja sama bersama, identitas keindonesiaan yang inklusif dapat diwujudkan. Toleransi, saling menghargai, dan kolaborasi antar individu dan kelompok akan menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang kuat dan inklusif.

Selain itu, ada akar masalah yang mendasari konflik yang sering muncul di berbagai lapisan masyarakat. Konflik yang timbul akibat keragaman masyarakat

terkadang lebih berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Contohnya, di Indonesia, terdapat situasi di mana seorang calon legislatif dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menyebar ujaran kebencian dan menyebarkan informasi palsu terkait isu SARA. Hal ini menjadi salah satu isu politik yang secara tidak langsung berkaitan dengan identitas sosial.

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah salah satu contoh bagaimana masalah politik identitas semakin memburuk. Dalam kontes tersebut, dua pasangan calon gubernur mencalonkan diri: Basuki Tjahaja Purnama, seorang non-Muslim dari minoritas Tionghoa, dan Anies Baswedan, seorang Muslim dari kelompok mayoritas Jawa. Konflik antara individu dari latar belakang etnis, ras, dan agama yang berbeda, seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, berdampak pada munculnya politik identitas. Isu SARA yang memengaruhi munculnya politik identitas diperkuat oleh situasi ini. Namun, pada akhirnya, tujuan dari tindakan ini berubah menjadi satu konsep yang lebih luas, yaitu membangun keterkaitan antara politik identitas dan politik perbedaan, pengakuan, dan multikulturalisme. Akibatnya, hal ini menjadi alat politik yang digunakan untuk mendorong agenda kelompok tertentu, seperti kelompok suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Ungkapan "Semua politik adalah politik identitas" mencerminkan hal ini. Ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi politik di Indonesia dan juga di banyak negara lain yang mengalami dinamika serupa. Berbagai gerakan sosial muncul sebagai hasil dari fenomena politik identitas ini, yang secara signifikan memengaruhi berbagai aspek

sosial dan politik. Penguatan isu pemerintahan individu yang unik ini kini telah menjadi isu global, bukan hanya isu lokal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartiko dan Galuh dalam studi berjudul "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," dinyatakan bahwa keputusan terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) memiliki dampak besar bagi negara demokrasi di seluruh dunia. Pemilu bukan hanya berperan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai panggung kompetisi yang paling adil bagi partai politik. Hal ini mencakup evaluasi terhadap sejauh mana partai politik tersebut telah memenuhi fungsi, peran, dan pertanggungjawaban atas kinerjanya selama periode tertentu kepada rakyat yang telah memilihnya.. (Kartiko, 2009). (Kartiko, 2009).

Pemilihan sistem Pemilu pada dasarnya merupakan suatu proses politik, di mana pertimbangan mengenai keuntungan politis hampir selalu menjadi faktor yang memengaruhi pemilihan sistem tersebut. Sebagai contoh, referendum Italia pada tahun 1993 mengakibatkan perubahan menuju sistem Mixed Member Proportional (MMP). Kejadian tersebut menjadi awal dari serangkaian perubahan signifikan dalam sistem pemilihan umum di berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar negara yang melakukan perubahan pada sistem pemilihan umum cenderung bergerak ke arah yang lebih memperhatikan proporsionalitas.

Beberapa negara menambahkan unsur representasi proporsional (PR) ke dalam sistem pluralitas yang sudah ada, baik sebagai sistem paralel atau MMP. Ada

juga negara yang sepenuhnya mengganti sistem mereka dengan sistem List PR. Perubahan yang paling umum terjadi adalah peralihan dari sistem pluralitas/mayoritas/distrik menjadi sistem campuran, dan jarang terdapat contoh yang menuju ke arah sebaliknya.

Sebagai contoh, Madagaskar, yang sebelumnya menggunakan sistem List PR, tidak beralih menjadi sistem pluralitas/mayoritas/distrik murni. Sebaliknya, Madagaskar memilih sistem hibrida di mana komponen FPTP (First-Past-The-Post) memiliki bobot lebih besar daripada sistem List PR. Perubahan ini mencerminkan beragam upaya untuk mencapai keseimbangan antara elemen-elemen proporsionalitas dan representasi daerah dalam sistem pemilihan umum. (Said, 2023)

Sistem pemilihan umum adalah mekanisme yang mengubah hasil suara dalam pemilu menjadi kursi-kursi yang diperoleh oleh partai politik dan kandidat. Proses perancangan sebuah sistem pemilihan umum dimulai dengan menyusun daftar kriteria yang merangkum tujuan yang ingin dicapai, hal-hal yang harus dihindari, dan gambaran umum tentang badan legislatif dan pemerintahan eksekutif yang diinginkan. (Mubarok, 2021)

Pada Pemilu tahun 2019 di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk Pemilihan Umum Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemilihan Umum Legislatif. Pemilu Legislatif mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebanyak 27 partai politik mengajukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun hanya 16 partai politik yang berhasil memenuhi syarat dan menjadi peserta resmi dalam pemilu tersebut.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari total 139.971.260 suara sah yang diberikan kepada partai politik peserta pemilu, sebanyak 126.376.418 suara (90,29%) diberikan kepada 9 partai politik yang berhasil mencapai ambang batas perolehan suara. Sementara itu, sebanyak 13.594.842 suara (9,71%) yang diberikan kepada partai politik peserta pemilu lainnya tidak dihitung karena tidak mencapai ambang batas perolehan suara. Situasi ini mengindikasikan bahwa belum semua suara pemilih terwakili di parlemen, dan sejumlah partai politik tidak berhasil melewati ambang batas untuk mendapatkan kursi di legislatif.

Perdebatan mengenai sistem pemilihan umum dan ambang batas perolehan suara baru-baru ini menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang akan menjadi dasar hukum untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam konteks ini, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penyederhanaan jumlah partai politik, dan beberapa alternatif dipertimbangkan dalam RUU tersebut.

Masalah utama yang dihadapi dalam sistem pemilihan umum adalah bagaimana menerapkan mandat representasi yang bersifat partisan sebagai acuan dalam perolehan kursi bagi partai politik. Salah satu pertimbangan kunci adalah perbedaan jumlah penduduk antara berbagai daerah. Oleh karena itu, RUU tersebut mempertimbangkan penggunaan sistem Representasi Proporsional yang dikombinasikan dengan elemen-elemen lain sebagai alternatif yang layak untuk

dipertimbangkan. Pendekatan ini dapat membantu mengakomodasi perbedaan populasi antar daerah dan memastikan representasi yang lebih adil dalam perwakilan politik..

Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan beberapa negara, yaitu sistem monarki absolut yang berlandaskan pada ajaran Islam sesuai dengan paham Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kebebasan. Sultan menempati posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta pemimpin keagamaan dalam sistem ini. Selain itu, Sultan Brunei juga mengepalai portofolio sebagai menteri pertahanan dan menteri keuangan. Posisinya sebagai sultan diwarisi dari garis keturunan panjang yang telah memerintah selama 600 tahun. (Mukoyama, 2020).

Dewan Legislatif Brunei baru dibentuk pada bulan September 2000, dan tugasnya adalah memberikan nasihat kepada sultan. Sistem pemerintahan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dan tradisi sepanjang sejarah Brunei, yang memberikan peran sentral kepada sultan sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab luas terkait pemerintahan, pertahanan, keuangan, dan urusan keagamaan.

Negara Malaysia menerapkan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, di mana Yang di-Pertuan Agong menjabat sebagai Kepala Negara. Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja konstitusional yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun dari kesembilan kesultanan di Malaysia secara bergilir. Sementara itu, Kepala Pemerintahan Malaysia adalah Perdana Menteri, yang juga merupakan anggota

Majelis Rendah (Dewan Rakyat) dan harus memiliki mayoritas dukungan di parlemen. Proses penunjukan resmi Perdana Menteri dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong.

Sistem legislatif Malaysia mengadopsi model bicameral, terdiri dari Majelis Tinggi (Dewan Negara) dan Majelis Rendah (Dewan Rakyat). Majelis Tinggi terdiri dari 70 anggota, di mana 26 anggota berasal dari Majelis Negara Bagian, dan 44 anggota dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Anggota Majelis Tinggi menjabat selama tiga tahun dengan batas maksimal dua periode. Dengan struktur ini, Malaysia menciptakan kerangka pemerintahan yang memadukan unsur monarki konstitusional dan sistem parlementer dalam sistem politiknya..

Indonesia menerapkan Sistem Presidensil Konstitusional dalam struktur pemerintahannya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa amendemen, konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi. Sebagai hasilnya, Presiden di Indonesia tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, Presiden memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan, menjalankan kebijakan publik, serta memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif di tingkat nasional.

Pemasaran politik pada dasarnya adalah konsep yang digunakan oleh kandidat untuk memperoleh dukungan dari pemilih dengan menggambarkan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh mereka. Dalam era

digital, seperti yang terlihat pada Pemilihan Presiden (PILPRES) 2019, pemasaran politik tidak mengalami perbedaan mendasar dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan menarik yang perlu dicermati, yaitu penekanan serangan pada isu ekonomi dan agama.

Perubahan ini dapat dihubungkan dengan pengalaman dari Pemilihan Kepala Daerah Jakarta sebelumnya, yang telah mengubah pandangan dan pemikiran pemilih dalam menentukan pemimpin yang dapat mewakili aspirasi mereka untuk kepentingan bangsa dan warganya. Fokus serangan pada isu ekonomi dan agama dapat mencerminkan pergeseran dalam prioritas dan perhatian masyarakat, serta strategi kandidat untuk menarik perhatian dan dukungan dari pemilih.

Sebagai pertahanan, Presiden Joko Widodo memiliki potensi kuat dalam pemilihan presiden saat ini. Kekuatan Joko Widodo tidak hanya berasal dari kinerjanya selama satu periode kepemimpinannya, tetapi juga dari dukungan politik yang diberikan oleh Partai Politik (PARPOL) yang mengusungnya untuk kembali memimpin negara bersama calon wakil presidennya, KH. Ma'ruf Amin, yang dipilih melalui negosiasi politik di dalam lingkaran partai politik pengusung..

Pemilihan KH. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik untuk menghadapi potensi munculnya isu-isu politik identitas agama mayoritas di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatasi potensi perdebatan seputar identitas agama mayoritas dan memfokuskan perhatian pemilih pada agenda-agenda lain dalam pemilu. Pemilih muda atau milenial di

Indonesia memiliki karakteristik yang cenderung bimbang dalam menentukan aspirasi politik mereka dalam konteks demokrasi elektoral. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpastian terkait terpilihnya calon wakil presiden yang dipilih oleh kubu petahana dan isu-isu ekonomi yang melibatkan kemerosotan ekonomi Indonesia. Salah satu contoh adalah naiknya harga dolar AS yang mempengaruhi nilai Rupiah, serta kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mungkin diharapkan dapat mengatenui isu-isu identitas agama mayoritas dan menarik perhatian pemilih, terutama pemilih muda, dengan fokus pada agenda-agenda lain yang dianggap penting, seperti ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Isu-isu tersebut diambil oleh kubu penantang sebagai amunisi untuk mendapatkan dukungan pemilih. Dalam dinamika politik, kedua kubu bersaing untuk mempengaruhi aspirasi politik pemilih secara luas dalam Pemilihan Presiden (PILPRES). Namun, pasangan dengan nomor urut 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin) harus menyajikan pemasaran politik yang segar dan berbeda dari sebelumnya agar dapat meraih dukungan dari pemilih kunci. Ini adalah bagian penting dari strategi kampanye untuk membedakan diri dari kubu penantang dan memenangkan pemilih muda yang memiliki peran penting dalam hasil pemilihan.

Kampanye dalam pemasaran politik merupakan upaya yang diorganisasi oleh sebuah kelompok atau agen perubahan dengan tujuan mempengaruhi target sasaran agar mereka dapat menerima, memodifikasi, atau mengubah ide, sikap, dan perilaku tertentu. Konsep dasar ini, seperti yang dijelaskan oleh Kotler dan Roberto,

merujuk pada proses persuasi yang direncanakan dan terorganisir. Menurut Roger dan Storey, kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar audiens selama periode waktu tertentu. Kampanye politik memiliki beberapa aspek penting yang melibatkan strategi komunikasi yang terencana dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, kampanye politik melibatkan interaksi antara peserta politik dan pemilih dengan harapan memengaruhi persepsi, pandangan, dan sikap pemilih terhadap kandidat, partai, atau isu tertentu, termasuk:

- a. Menciptakan "tempat" khusus dalam pemikiran audiens terkait dengan produk, kandidat, atau gagasan yang akan disampaikan.
- b. Berlangsung dalam berbagai tahap, mulai dari menarik perhatian audiens hingga mengajak mereka untuk melakukan tindakan nyata.
- c. Mendramatisir ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada audiens dan mengundang mereka untuk terlibat, baik secara simbolis maupun praktis, untuk mencapai tujuan kampanye.

Tujuan dan konsep kampanye membentuk dasar bagi perancangan strategi kampanye yang bertujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini biasanya dirinci dalam langkah-langkah taktis yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan beberapa prinsip pokok perlu diperhatikan dengan serius dalam pengembangan strategi kampanye, khususnya melalui positioning (penempatan), branding (pemberian merek), dan segmenting (segmentasi). Positioning didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas untuk menanamkan kesan di benak

konsumen, memungkinkan mereka untuk membedakan produk dan layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi.

Media yang digunakan dalam kampanye telah terbukti memiliki tingkat akurasi tinggi berdasarkan standar internasional yang diuji oleh International Fact Checking Network (IFCN). IFCN merupakan jaringan pengecekan fakta yang didirikan dan dikelola oleh Poynter Institute, sebuah sekolah jurnalisme nirlaba terkemuka dan organisasi penelitian yang berbasis di St. Petersburg, Florida. Di Indonesia, saat ini ada enam media dan organisasi yang diakui serta telah mendapatkan sertifikasi dari International Fact Checking Network, termasuk Liputan6.com, Suara.com, Tirto.id, Kompas.com, dan Tempo.com.

Dalam konteks isu pemberitaan bahwa Jokowi resmi terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2024, peneliti memilih untuk mengkaji pemberitaan yang diterbitkan pada bulan Maret 2023 oleh media online CNN Indonesia dan Liputan6.com. Kedua media ini dipilih sebagai subjek kajian karena keduanya merupakan portal berita yang secara aktif memberikan pembaruan tentang setiap peristiwa di Indonesia. CNN Indonesia awalnya dibentuk melalui kerjasama investor asing, Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc., dengan salah satu anak perusahaan CT Corpora milik Chairul Tanjung. Melalui kemitraan strategis antara kedua korporasi ini, CNN Indonesia diluncurkan sebagai portal berita online dan stasiun TV berbahasa Indonesia. CNN Indonesia merupakan bagian dari Transmedia Group yang juga mencakup TRANS TV, TRANS7, Detik.com, dan CNBC Indonesia. CNNIndonesia.com dioperasikan oleh PT Trans Digital Media, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Agranet Multicitra Siberkom sebelum

mengalami perubahan nama pada tahun 2017 (Detik.com, 2019). Penting untuk mengkaji pemberitaan dari kedua portal berita ini karena mereka memiliki reputasi sebagai sumber berita terpercaya dan memiliki cakupan yang luas dalam melaporkan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia.



Gambar 1. 1 Berita Jokowi Sebagai Pemilih di CNN

Selain CNN Indonesia, peneliti juga memilih Liputan6.com sebagai subjek media yang akan digunakan. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, Liputan6.com telah menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia yang haus akan informasi secara cepat dan berkembang. Sebagai hasilnya, Liputan6.com selalu proaktif dan responsif dalam menyajikan berita-berita yang tengah menjadi perbincangan

hangat. Berita-berita yang dihadirkan oleh Liputan6.com sesuai dengan moto mereka, yaitu jujur, mendalam, dan dapat dipercaya.

Dari uraian di atas, peneliti mencatat adanya perbedaan sudut pandang yang signifikan dalam menyajikan dan membingkai suatu pemberitaan. Hal ini menjadi objek penelitian yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Peneliti berhipotesis



Gambar 1. 2 Berita Jokowi Sebagai Pemilih di Liputan6.com

bahwa perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh kepentingan dan ideologi masing-masing media. Permasalahan-permasalahan terkait pemberitaan Jokowi yang terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2024 diangkat oleh CNN Indonesia dan Liputan6.com. Permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh keduanya umumnya mencakup tema-tema terkait rincian pemilih Pemilu 2024.

Dari penjelasan di atas, peneliti mengidentifikasi adanya perbedaan sudut pandang yang signifikan dalam penyajian dan penempatan suatu pemberitaan, yang

menjadi fokus menarik untuk diteliti lebih mendalam. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan ideologi yang dimiliki oleh masing-masing media. Terdapat permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh CNN Indonesia dan Liputan6.com terkait pendaftaran resmi Jokowi sebagai pemilih Pemilu 2024. Secara umum, isu-isu yang diangkat oleh keduanya cenderung mencakup tema-tema yang berkaitan dengan rincian pemilih Pemilu 2024.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Framing Pemberitaan Jokowi Resmi Terdaftar Sebagai Pemilih Pemilu 2024 Pada Cnnindonesia.Com Dan Liputan6.Com”** dengan tujuan untuk melihat bagaimana masing-masing media melakukan pembingkai dan merekonstruksi makna pemberitaan pada kasus tersebut.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini untuk memudahkan peneliti lebih lanjut, peneliti memfokuskan riset yang akan diteliti, objek kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya mengarah pada permasalahan Jokowi Resmi Terdaftar Sebagai Pemilih Pemilu 2024 yang diangkat oleh Cnnindonesia.Com dan Liputan6.com.

1.3. Rumusan Masalah

Dalam penulisan agar proposal penelitian ini lebih jelas dan terarah, Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana penyajian berita Jokowi Resmi Terdaftar Sebagai Pemilih Pemilu 2024 Pada Cnnindonesia.Com Dan Liputan6.Com ?
2. Bagaimana konstruksi makna pemberitaan mengenai jokowi resmi terdaftar sebagai pemilih pemilu 2024 pada Cnnindonesia.Com Dan Liputan6.Com ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembuatan proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara penyajian berita pada Cnnindonesia.Com Dan Liputan6.Com mengenai Jokowi Resmi Terdaftar Sebagai Pemilih Pemilu 2024
2. Untuk mengetahui konstruksi makna pemberitaan melalui media Cnnindonesia.Com Dan Liputan6.Com.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan penulis tentang analisis framing model dalam sebuah pemberitaan. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada khususnya para mahasiswa Ilmu komunikasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan maupun pengalaman baru serta dapat mendorong semangat dalam penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature kepustakaan atau refrensi, untuk penelitian kualitatif yang khususnya berkaitan pemberitaan, serta dapat memberikan kontribusi dan dapat mengedukasi masyarakat, khususnya pembaca berita online agar lebih kritis dalam membaca berita.